

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Agency Theory (Teori Keagenan)

Menurut Brigham, Eugene F. dan Houston (2011) Teori keagenan adalah kerangka teoritis yang mendasari praktik bisnis perusahaan. Teori ini didasarkan pada teori keputusan, sinergi ekonomi dan teori sosiologis organisasi. Dasar dari teori ini adalah karena adanya hubungan kerja antara manajer (agency) yang memberikan wewenang.

Dalam perusahaan, hubungan keagenan akan ditunjukkan oleh hubungan antara pemegang saham (principals) dan manajer perusahaan (juga dikenal sebagai agen) (Moloi & Marwala, 2020). *Prinsipal* atau pemegang saham mempekerjakan agen untuk melakukan tugas kepentingan prinsipal termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Putra, 2019).

Jika agen tidak terbuat sesuai kepentingan prinsipal, maka akan terjadi konflik keagenan (agency conflict), sehingga memicu biaya keagenan (agency cost), (Rahmawati, 2006). Biaya agensi muncul ketika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berlainan (Dewi & Abundanti, 2019).

Menurut Jansen dan Meckling (1976) dalam Ramadona (2019) menyatakan agency cost meliputi tiga hal, yaitu *monitoring cost*,

bonding cost, and *residual loss*. Monitoring cost merupakan pengeluaran yang dibayar oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen agar tidak menyimpang.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori agensi, dewan komisaris berperan untuk melakukan pengawasan dalam memecahkan permasalahan agensi yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham.

2. Teori Legitimasi

Konsep legitimasi penting dalam menganalisis hubungan antara perusahaan dan lingkungannya. Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Mousa, et. al. (2015) menyatakan bahwa teori legitimasi ini berasal dari studi tentang organisasi yang sah. Agar dianggap sah, sebuah organisasi harus memiliki nilai-nilai yang konsisten dengan sistem sosial yang lebih besar di mana ia beroperasi. Menurut Mousa, et. al. (2015), Legitimasi suatu institusi didefinisikan sebagai sejauh mana tindakannya konsisten dengan, atau memiliki potensi untuk mengubah, norma dan nilai sosial yang berlaku. Memperoleh legitimasi membutuhkan pembuktian bahwa praktik bisnis sejalan dengan standar masyarakat.

Teori legitimasi menyatakan bahwa inisiatif yang diambil oleh bisnis atau organisasi didorong oleh lingkungan normatif. Operasi perusahaan memiliki pengaruh langsung pada kondisi lingkungan karena sifat dari bisnis inti mereka (Febriani & Munawaroh, 2022).

Berthelot dan Robert (2011) menyatakan bahwa untuk mencapai legitimasi, perusahaan sangat perlu untuk menunjukkan praktik lingkungan mereka dengan mengungkapkan lingkungan sosial. Hadjoh dan Sukartha (2013) berpendapat bahwa pengungkapan lingkungan diyakini membantu memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan legitimasi yang diperoleh (Putri & Budiyanto, 2018).

Secara teoritis dan empiris, pengungkapan tentang kegiatan tanggung jawab sosial amat diperlukan bagi perusahaan untuk menciptakan citra dan reputasi yang positif dan mendapatkan legitimasi dari investor. CSR memberikan gambaran bagi pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan perusahaan dalam mendistribusikan pendapatan yang dihasilkan, baik untuk operasi perusahaan, pengembangan sosial kemasyarakatan, program kompensasi dan pengembangan yang diberikan kepada karyawan, donasi dan bantuan sosial, serta apresiasi terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan keberlanjutan dukungan lingkungan (Tangngisalu & Atestasi, 2020). Maka hal ini, penyusunan informasi CSR sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan (Rustiarini (2010) dalam Muhlis & Gultom (2021)).

3. Kinerja Keuangan

Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan

standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk dapat mengetahui efektifitas jalannya operasional perusahaan (Marka & Serly 2020).

Menurut Rudianto (2013:189) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu.

Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan (Agustin, 2020).

Dalam penelitian Siregar (2021), menyatakan bahwa pengukuran kinerja pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan diantaranya rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio pertumbuhan perusahaan.

Pada penelitian ini pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio profitabilitas karena aspek paling penting dalam menilai kinerja keuangan terdapat pada rasio profitabilitas dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan (Basir dkk, 2021).

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menurut Widjadja (2009) adalah suatu ukuran yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan, antara lain total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan total aktiva. Besar atau kecilnya perusahaan dapat diketahui atas jumlah asset yang dimiliki perusahaan

selama periode tahun berjalannya perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan perusahaan dalam memperoleh dana (Tambunan & Prabawani, 2018).

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total asset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan asset yang ada di perusahaan tersebut (Widodo et al., 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ukuran perusahaan dikategorikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro, yaitu usaha milik perseorangan dengan kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perseorangan dan bukan merupakan anak perusahaan dari usaha menengah maupun usaha besar, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perseorangan dan bukan merupakan anak perusahaan dari usaha menengah maupun usaha besar, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. Usaha besar, yaitu usaha ekonomi yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih lebih besar dari usaha menengah.

Perusahaan dengan ukuran besar akan dianggap menarik oleh investor karena perusahaan yang besar akan memiliki kegiatan operasional yang besar. Dapat diartikan kegiatan operasional yang banyak akan meningkatkan laba dan dapat menunjang kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan akan berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangannya dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil. Karena aktiva yang dimiliki perusahaan yang lebih besar dapat memberikan lebih banyak hasil daripada perusahaan yang lebih kecil.

5. Dewan Komisaris

Good Corporate Governance adalah suatu aturan yang mengarahkan semua unsur dalam perusahaan untuk bekerja secara bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Pramono & Fakhrudin, 2019). Salah satu GCG yang mempengaruhi keuangan yaitu dewan komisaris.

★ Menurut Bukhori (2012:29) mengemukakan bahwa “dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG”

Menurut Dewi (2018), Dewan komisaris adalah wakil para pemegang saham dalam entitas bisnis yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang bertugas melakukan pengawasan, memberikan nasihat atau arahan kepada dewan Direksi terkait perencanaan, pengelolaan, serta

pelaksanaan bisnis dan isu-isu Perseroan dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal perusahaan.

Menurut UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 mengemukakan bahwa wewenang, tugas, dan tanggung jawab dewan komisaris dalam perusahaan, antara lain:

1. Melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasehat kepada direksi.
2. Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apa bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
3. Bertanggung jawab secara pribadi atas kapailitan perseroan apa bila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat.
- ★ 4. Diberikan wewenang untuk membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas dewan komisaris.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan lagi bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memerhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

6. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Memasukkan kepedulian lingkungan dan sosial ke dalam operasi bisnis dan hubungan dengan pemangku kepentingan secara sukarela, melebihi apa yang diwajibkan oleh hukum, adalah contoh tanggung jawab sosial perusahaan yaitu CSR. Selain itu, CSR perusahaan adalah komitmen organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan semua pemangku kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Wahyuni, 2018).

Di antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam CSR adalah karyawan, pemegang saham, manajer, konsumen, organisasi non-pemerintah, pemerintah, ekosistem, pemasok, dan masyarakat. Contoh kegiatan CSR meliputi peningkatan kesejahteraan staf; pengurangan penggunaan energi; perlindungan lingkungan alam; pelaksanaan kegiatan filantropi, seperti donasi dan pelayanan sukarela; produksi produk yang mengintegrasikan atribut sosial; dan dukungan bagi masyarakat lokal. Tingkat dan luasnya tanggung jawab yang diakui organisasi kepada masyarakat ditentukan oleh cara strategi CSR organisasi mendefinisikan dan melibatkan pemangku kepentingan (Qiu et al., 2021).

Pengukuran dan pengungkapan CSR masih mengacu pada prinsip yang disusun oleh organisasi global, yaitu *Global Reporting Initiative Indeks* (Indeks GRI) (Roliffa, 2018). Pengukuran tersebut tentunya belum menggambarkan prinsip-prinsip islam seperti belum mengungkapkan terbebasnya dari unsur riba, gharar, dan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh islam. Dalam meningkatnya pelaksanaan CSR dalam ekonomi syariah, maka meningkat pula keinginan membuat pelaporan

social yang bersifat syariah (*Islamic Social Reporting* atau ISR) (Rollia, 2017).

Islamic Social Reporting Index (ISR) merupakan pengembangan pengungkapan tanggung jawab social yang didalamnya sesuai prinsip syariah. Index ISR memuat item-item standar CSR dengan standar yang ditetapkan oleh AAIOFFI (*Accounting Ana Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh satu entitas islam (Otman et al, 2009).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indeks ISR yang dirancang oleh Otman et. al (2009), yang kemudian dikembangkan oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia seperti penelitian oleh Fitria dan Hartanti (2010) serta Hasan dan Harahap (2010). Berikut adalah enam tema pengungkapan dalam kerangka indeks ISR:

a. Investasi dan Keuangan

Item pengungkapan yang termasuk dalam tema investasi dan keuangan adalah pengungkapan mengenai informasi atas sumber keuangan dan investasi perusahaan apakah mengandung interest-fee (riba) dan speculative-fee (gharar) yang sangat diharamkan dalam Syariah islam. Selain itu terdapat juga pengungkapan mengenai zakat, kebijakan atas pengapusan piutang tak tertagih, dan pernyataan nilai tambah dari manajemen (Othman et. al, 2009).

b. Produk dan Jasa

Item pengungkapan yang termasuk dalam tema produk dan jasa adalah pengungkapan atas pertanggungjawaban perusahaan terhadap produk yang diperjualbelikan. Othman et. al (2009) menyatakan bahwa semua produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan haruslah bebas dari kategori haram dan harus diidentifikasi kehalalannya, selain itu produk dan jasa yang ditawarkan juga harus aman dan terjamin kualitasnya.

c. Karyawan

Othman et. al (2009) memaparkan bahwa masyarakat islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik pekerjaan, jaminan keselamatan dan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak, dan lingkungan kerja. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan mengenai konsep gaji, yang artinya:

Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. (AtTaubah: 105).

d. Masyarakat

Dalam penelitian ini item-item yang termasuk ke dalam tema masyarakat meliputi pemberian sedekah atau donasi, pemberian beasiswa, sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberdayaan ekonomi masyarakat,

pemberdayaan kerja bagi siswa lulusan sekolah atau kuliah, pengembangan dalam kepemudaan, peningkatan kualitas hidup, kepedulian terhadap anak-anak, mensponsori berbagai kegiatan positif yang dilakukan masyarakat seperti kegiatan kesehatan, olahraga, hiburan, pendidikan, dan agama (Haniffa 2002).

e. Lingkungan

Item ini memberikan pengungkapan mengenai tindakan perusahaan terkait dengan lingkungan. Tema ini didasarkan pada konsep keseimbangan, pertengahan, dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup, sehingga informasi yang terkait penggunaan sumber daya dan program-program yang dilaksanakan untuk melindungi lingkungan hidup harus diungkapkan oleh perusahaan (Othman dan Thani, 35 2009). Ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai perlakuan terhadap lingkungan adalah pada surat Al-Baqarah ayat 205-206:

Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah" bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa. Maka pantaslah baginya neraka Jahanam. Dan sesungguhnya (Jahanam itu) tempat tinggal yang terburuk.

f. Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan tata kelola dalam sistem ekonomi konvensional. Kemunculan tata kelola perusahaan dalam islam

berasal dari konsep khalifah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 30:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”, mereka berkata: “mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau? Tuhan berfirman; “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Manusia sebagai utusan Allah SWT telah diberikan kepercayaan oleh Dia untuk menjaga bumi beserta isinya dari segala bentuk kerusakan. Pertanggungjawaban manusia atas amanah tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat atau para stakeholders, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik bumi beserta isinya. Dalam islam tujuan utama akuntabilitas adalah semata-mata untuk mencapai Falah dan kesejahteraan social.

B. Hasil Penelitian Terdahulu:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1	(Handayani, dkk. 2018). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2012-2016. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi 14:125-33.	X ₁ : CSR Y : Profitabilitas	CSR berpebgaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah
2	(Pratiwi, Aliah dkk 2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap	X ₁ : CSR Y : Profitabilitas	CSR berpengaruh positif terhadap

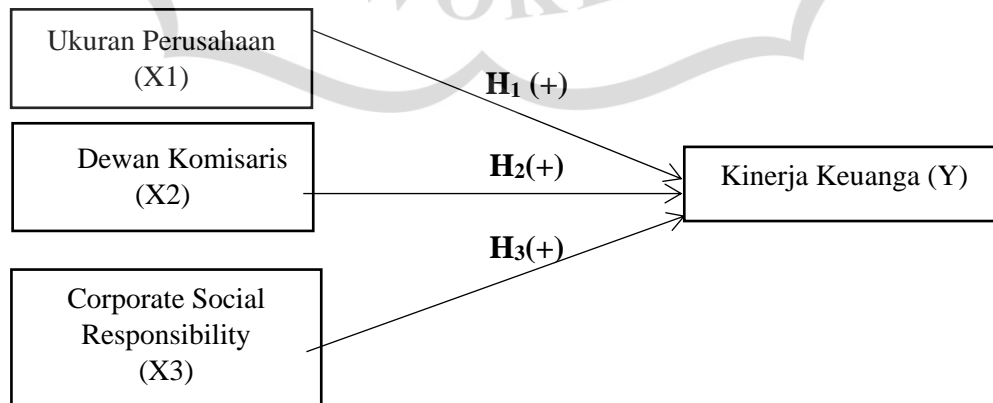
	Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI. Owner 4(1):95. doi: 10.33395/owner.v4i1.201.		ROA
3	(Mega dkk., 2020) Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	X ₁ : CSR Y : Profitabilitas	CSR Berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas
4	(Heryanto, 2017) Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015) Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017, Hal 1-8	X ₁ : CSR Y : Profitabilitas	CSR berrpengaruh positif terhadap profitabilitas
5	(Parengkuan, 2017) Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Vol 5, No 2 (2017)	X ₁ : CSR Y : Kinerja Keuangan	CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA
6	(Nurdiana, 2018) Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Vol. XIII. No 6, Juli 2018	X ₁ : Ukuran Perusahaan Y : Profitabilitas	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
7	(Rifai dkk, 2017) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Modal dan pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2012) Volume 1 Februari 2015	X ₁ : Ukuran Perusahaan Y : Profitabilitas	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
8	(Dahlia, 2018) Pengaruh Struktur Modal , Ukuran Perusahaan, Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan yang Dimoderasi Inflasi (Jurnal Muara Ilmu Ekonmi dan Bisnis) Vol.2, No.2, Oktober 2018: hlm 494-502	X ₁ : Ukuran Perusahaan Y : Kinerja Keuangan	Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan
9	(Fahmi & Rahayu, 2017) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran	X ₁ : Ukuran Perusahaan Y : Kinerja Keuangan	Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap

	Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan yang Terdaftar di BEI ISSN 1858-3202, Jurnal Bina Akuntansi IBBI		kinerja keuangan
10	(Nur Amalia & Khuzaini, 2021) Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Manajemen Aset, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Jurnal Ilmu Akuntansi ISSN: 2714-6359 Vol:3 Nomor 2 September 2021	X ₁ : Ukuran Perusahaan Y: Kinerja Keuangan	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
11	(Eka,2018) Pengaruh profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Jurnal Ilmu dan riset Akuntansi	X ₁ : Ukuran Perusahaan Y: Kinerja Keuangan	Ukuran Perusahaan berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan
12	(Safari, dkk 2019.) Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan Juena Inspirasi Ekonomi Vol. 3 No. 4 Desember 2021. ISSN: 2503-3123	X ₁ : Ukuran Perusahaan Y : Kinerja Keuangan	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
13	(Purba & Yad 2015) Pengaruh Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> Terhadap Profitabilitas dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 4, No. 8, 2015 : 2428-2443	X ₁ : Ukuran Perusahaan Y : Profitabilitas	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas
14	(Adawiyah & Suprihhadi, 2017) Pengaruh Modal, Aset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen Volume 6, Nomor 1, Januari 2017	X ₁ : Ukuran Perusahaan Y: Profitabilitas	Ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap profitabilitas
15	(Lorenza, dkk 2020) Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Jurnal Ekonomi Manajemen Volume 6 Nomor 1 (Mei 2020) 13-20	X ₁ : Ukuran Perusahaan Y : Profitabilitas	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
16	(Raja, 2016) Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Property dan	X ₁ : Dewan Komisaris Y : Profitabilitas	Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap profitabilitas

	Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2014 Jurnal Manajemen Volume 4		
17	(Fitriyani, 2021) Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit Terhadap Profitabilitas Perbankan di BEI Tahun 2017-2019 Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 5 No. 2, 2021	X ₁ : Dewan Komisaris Y : Profitabilitas	Dewan Komisaris tidak mempengaruhi signifikan terhadap profitabilitas
18	(Anjani & Yadnya, 2017) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI	X ₁ : Dewan Komisaris Y : Profitabilitas	Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap profitabilitas
19	(Rikumahu, 2017) Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri ISSN: 2541-0180 Vol 2 No. 2, September 2017	X ₁ : Dewan Komisaris X ₂ : Corporate Social Responsibility Y : Kinerja Keuangan	Dewan Komisaris dan Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
20	(A. S. Dewi, 2018) Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Di Indonesia Jurnal Benefita 3 (3) Oktober 2018 (445-454)	X ₁ : Dewan Komisaris Y : Kinerja Keuangan	Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah kinerja keuangan (Y). Sedangkan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Dewan Komisaris (X1), Ukuran perusahaan (X2), *Corporate Social Responsibility* (X3). Dari kerangka konseptual diatas dapat dipikirkan bahwa keempat variabel diatas akan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yang saat ini diprosikan sebagai kinerja keuangan.

2. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat seberapa besar *asset* yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan ini menggambarkan hak dan kewajiban serta permodalan perusahaan (Nurdiana, D., 2018),

Menurut (Bagus *et al.*, 2019) Ukuran perusahaan dapat diprosikan sebagai pengungkapan laporan tahunan mengenai informasi dari kalangan perusahaan. Hasil dari penelitian (Ayu *et al.*, 2021) memberikan bukti empiris bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Dan juga penelitian dari (Wage dkk, 2021) memberikan bukti empiris bahwa Ukuran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya penelitian (Sukanti *et al.*, 2022) memberikan bukti empiri bahwa Ukuran

Perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

b. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi perusahaan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi (Fahmi & Rahayu, 2017).

Didalam penelitian (Putra & Santoso, 2021) menurut Purwaningtyas (2011) menyatakan bahwa semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan kinerja keuangan yang menggunakan profitabilitas akan semakin baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga ikut meningkat.

Hasil penelitian dari (Putra & Santos., 2021) memberikan bukti empiris bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian (Subiyanti & Zannati, 2019) juga memberikan bukti empiris bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selain itu juga, (Lumbanraja,

2021) memberikan bukti empiris bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

c. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan

Dalam gagasan *corporate social responsibility*, bank tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai bank yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tetapi tanggung jawab bank harus berpijak pada triple bottom lines yaitu selain memperhatikan kondisi keuangan juga memperhatikan masalah social dan lingkungan hal itu sebagai pengungkapan bentuk tanggung jawab terhadap *stakeholder*, masyarakat, dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak akan menjamin bagi bank untuk tubuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi social dan lingkungan hidup. Karena *corporate social responsibility* akan memberikan *image* yang bagus bagi bank (Mayangsari, 2020).

Hasil penelitian dari Handayani dkk (2018) memberikan bukti empiris bahwa *corporate social responsibility* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selain itu juga, (Mayangsari, 2020) menyatakan bahwa *corporate social respobsibility* memiliki

pengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian dari (Heryanto & Juliarto, 2017) juga menyatakan bahwa *corporate social responsibility* memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dan penelitian (B. C. Pratama & Innayah, 2023) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

